

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Krisis keuangan global telah memusingkan banyak pihak belakangan ini. Salah satu akar permasalahan bersumber dari krisis keuangan yang melanda Amerika dan berkaitan dengan industri Kredit Kepemilikan Rumah Subprima. Diawali pada akhir tahun 2006, industri Kredit Kepemilikan Rumah Subprima di Amerika memasuki suatu masa yang disebut "masa kehancuran Kredit Kepemilikan Rumah Subprima". Tingginya angka penyitaan jaminan Kredit Kepemilikan Rumah Subprima ini telah menyebabkan perusahaan-perusahaan pemberi pinjaman Kredit Kepemilikan Rumah Subprima mengalami kepailitan. Kehancuran dari perusahaan-perusahaan Kredit Kepemilikan Rumah Subprima telah mengakibatkan harga pasar saham berbasis *real estate investment trust* jatuh dan membawa pengaruh luas terhadap bursa saham Amerika serta ekonomi secara keseluruhan.<sup>1</sup>

Krisis yang terjadi sebagai dampak dari kredit macet dalam bisnis properti (perumahan) oleh perbankan nasional Amerika Serikat maupun perbankan eropa yang bermain dalam pasar modal Amerika Serikat tersebut, memaksa pemerintah Amerika Serikat untuk campur tangan agar perekonomian nasional tetap stabil meski tindakan penyelamatan perbankan itu harus mengorbankan kepentingan rakyat banyak. Menggunakan pajak untuk dana talangan perbankan yang notabene berorientasi provit, ketika hendak mengucurkan dana ke bisnis properti. Kondisi semakin menyulitkan ketika perbankan harus membayar dana kepada kreditur sedangkan modal cadangan perbankan masih dalam bentuk kredit macet di sektor properti. Tidak seimbangnya antara penawaran dan permintaan membuat sektor

---

<sup>1</sup> Merza Gamal, *Krisis Keuangan Global dan Dilema Kredit Konsumtif Indonesia.*, <http://www.asia.groups@yahoo.com/group/ekonomi-islami/surveys>. (22 Oktober 2008)

properti semakin lesu, bangunan fisik terbengkalai dengan resiko penyusutan dan biaya perawatan yang tetap harus disediakan membuat perbankan yang mengucurkan modal pinjaman semakin goncang. Dampak yang paling jelas akan terjadi di Indonesia adalah, turunnya volume ekspor ke Amerika Serikat, terhambatnya arus investasi dari Amerika Serikat dan penarikan kembali pinjaman dalam bentuk Dolar Amerika Serikat yang akan mempengaruhi fluktuasi rupiah.

Krisis keuangan global yang terjadi saat ini memiliki dimensi yang luas. Sebagaimana kita ketahui bahwa krisis keuangan yang bermula dari Amerika Serikat ini telah menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian dunia. Tidak hanya terhadap sektor keuangan, sektor riil dan komoditas juga terkena dampaknya. Tingginya harga komoditas pertanian, pertambangan, dan energi telah menimbulkan kesulitan, terutama bagi negara berkembang termasuk Indonesia.<sup>2</sup>

Di Amerika Serikat sendiri, penyebab krisis keuangan dimulai dengan adanya kasus gagal bayar atas Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dari nasabah *non investment grade*. Namun, sebelum kasus gagal bayar atas nasabah *non investment grade* terungkap, benih-benih krisis keuangan tersebut sesungguhnya telah muncul dengan ditandai begitu atraktifnya transaksi keuangan, terutama produk-produk *derivatif* untuk kepentingan spekulatif. Maraknya produk-produk *derivatif* yang diperdagangkan ini tentu tidak berdiri sendiri. Kondisi ini ditopang oleh agresivitas pelakunya yang memiliki likuiditas berlimpah. Selain pemain lama, seperti reksa dana, asuransi, dana pensiun, dan perbankan pasar finansial Amerika Serikat kini juga diramaikan oleh investasi baru seperti *hedge funds* dan *private equity*. Khusus tentang *hedge fund* dan *private equity* ini, instrumen ini telah mampu menjadi ajang investasi baru yang atraktif karena didukung oleh likuiditas melimpah, yang utamanya berasal dari para pemilik modal kaya, baik investor individual maupun institusi. Para investor kaya ini tertarik dengan strategi investasi

---

<sup>2</sup> Daniri, *BCA, Petrodolar, dan Krisis Keuangan Global*, <http://www.madani-ri.com>. (3 Juni 2008)

melalui *hedge funds* ataupun *private equity* karena merupakan wahana investasi yang memberikan keuntungan yang lebih tinggi.

Krisis keuangan hebat yang sedang terjadi di Amerika Serikat, sebuah bencana besar di sektor ekonomi keuangan. Bangkrutnya Lehmann Brothers, perusahaan sekuritas berusia 158 tahun milik Yahudi ini menjadi pukulan berat bagi perekonomian Amerika Serikat yang sejak beberapa tahun terakhir mulai goyah. Bangkrutnya Lehmann Brothers langsung mengguncang bursa saham di seluruh dunia. Bursa saham di kawasan Asia seperti di Jepang, Hongkong, China, Australia, Singapura, India, Taiwan, dan Korea Selatan, mengalami penurunan drastis 7 sampai dengan 10 persen. Termasuk bursa saham di kawasan Timur Tengah, Rusia, Eropa, Amerika Selatan dan Amerika Utara. Tak terkecuali di Amerika Serikat sendiri, para investor di bursa Wall Street mengalami kerugian besar, bahkan surat kabar New York Times menyebutnya sebagai kerugian paling buruk sejak peristiwa serangan 11 September 2001.<sup>3</sup>

Pada tanggal 8 Oktober 2008 yang lalu, Indeks Harga Saham Gabungan tertekan tajam turun 10,38 %, yang membuat pemerintah panik dan terpaksa menghentikan suspen kegiatan pasar modal beberapa hari. Demikian pula Nikken di Jepang jatuh lebih dari 9 %.<sup>4</sup> Hampir semua pasar keuangan dunia terimbas krisis keuangan Amerika Serikat tersebut. Karena itulah para pengamat menyebut krisis ini sebagai krisis keuangan global. Krisis keuangan global yang terjadi belakangan ini, merupakan fenomena yang mengejutkan dunia, tidak saja bagi pemikir mikro dan makro, tetapi juga bagi para elite politik dan para pengusaha.

Dalam sejarah ekonomi, ternyata krisis sering terjadi dimana-mana, melanda hampir semua negara yang menerapkan sistem kapitalisme. Krisis demi krisis ekonomi terus berulang tiada henti, sejak tahun 1923, 1930, 1940,

---

<sup>3</sup> Agutianto, *Telaah terhadap Akar Krisis Keuangan Global: Momentum Ekonomi Syariah sebagai Solusi*, <http://www.pioner2b.wordpress.com> (21 Oktober 2008)

<sup>4</sup> *Ibid.*

1970, 1980, 1990, dan 1998 sampai 2001, bahkan sampai saat ini krisis semakin mengkhawatirkan dengan munculnya krisis keuangan di Amerika Serikat.<sup>5</sup> Krisis itu terjadi tidak saja di Amerika Latin, Asia, Eropa, tetapi juga melanda Amerika Serikat. Sepanjang abad 20 telah terjadi lebih 20 kali krisis besar yang melanda banyak negara. Fakta ini menunjukkan bahwa secara rata-rata, setiap 5 tahun terjadi krisis keuangan hebat yang mengakibatkan penderitaan bagi ratusan juta umat manusia.

Pada tahun 1922-1923, Jerman mengalami krisis dengan *hyper inflasi* yang tinggi. Karena takut nilai mata uang mengalami penurunan, gaji dibayar sampai dua kali dalam sehari. Selanjutnya pada tahun 1927 krisis keuangan melanda Jepang yang akhirnya 37 bank ditutup, akibat krisis yang terjadi pada bank-bank Taiwan. Pada tahun 1929-1930 The Great Crash (Pasar Modal di New York) dan kegagalan perbankan di Amerika, hingga net national productnya terpankaskan lebih dari setengahnya. Selanjutnya pada tahun 1931 Austria mengalami krisis perbankan yang kemudian mengakibatkan berfluktuasinya mata uang internasional. Hal ini membuat Inggris meninggalkan standar emas. Kemudian pada tahun 1944-1966 Prancis mengalami *hyper inflasi* akibat dari kebijakan yang mulai meliberalkan perekonomiannya. Pada tahun 1944-1946 Hungaria mengalami *hyper inflasi* dan krisis moneter. Ini merupakan krisis terburuk eropa.<sup>6</sup> Dari data dan fakta sejarah tersebut terlihat bahwa dunia tidak pernah sepi dari krisis yang sangat membahayakan kehidupan ekonomi umat manusia di muka bumi ini. Bahwa kerapuhan fundamental ekonomi merupakan penyebab utama munculnya krisis ekonomi. Ekonomi yang mengalami inflasi yang tidak terkawal, kadar pertukaran mata uang yang tidak seimbang, tingkat bunga yang tidak realistis, beban hutang luar negeri yang membengkak dan pengaliran modal yang berlaku berulang kali, telah menyebabkan kesulitan ekonomi, yang akhirnya akan membawa ekonomi negara ke dalam krisis ekonomi. Ini dengan jelas menunjukkan bahwa defisit neraca pembayaran, beban hutang luar negeri

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*

yang membengkak terutama sekali hutang jangka pendek, investasi yang tidak efisien, dan banyak indikator ekonomi lainnya telah berperan aktif dalam mengundang munculnya krisis ekonomi.

Setelah pailitnya salah satu lembaga keuangan terbesar, *Lehmann Brothers*. Guncangan ini akan menjadi batu ujian pada kekuatan perekonomian nasional ke depan. Dalam hal ini, ketahanan perekonomian nasional akan sangat tergantung pada kekuatan sistem keuangan domestik. Bila sistem keuangan nasional bisa bertahan, sangat mungkin krisis keuangan global kali ini tidak akan berdampak terlalu serius. Satu hal yang telah terbukti pada 2007, guncangan awal krisis keuangan global hanya mengakibatkan sekadar pelemahan indeks dan rupiah selama beberapa minggu, kemudian mengalami *rebound*.<sup>7</sup>

Ada beberapa alasan yang menyebabkan guncangan awal tersebut tidak berakibat fatal. Pertama, tidak adanya keterkaitan langsung yang erat antara lembaga keuangan internasional yang tengah kesulitan dan lembaga-lembaga domestik. Tidak terdapat placement atau loan yang diberikan secara signifikan oleh perusahaan-perusahaan Indonesia pada berbagai investment bank global. Kedua, bank-bank dan lembaga keuangan domestik masih mengalami banjir likuiditas. Ini terindikasi dari rendahnya rasio pinjaman terhadap simpanan (*LDR/Loan to Deposit Ratio*) yang berkisar di bawah 50 persen saat itu. Ketiga, geliat investasi pada sektor riil yang disebabkan oleh peningkatan kapasitas produksi industri nasional, setelah sebelumnya tertekan karena belum pulihnya permintaan.<sup>8</sup>

Akibat berbagai alasan itu, dampak yang dirasakan terisolasi pada *second-round effect* berupa pelemahan ekspor dan *capital-outflow* terbatas, yang kurang berakibat serius pada tingkat pertumbuhan secara umum. Hal tersebut terbukti dengan tumbuhnya perekonomian secara mengesankan pada

---

<sup>7</sup> M. Ikhsan Modjo, *Implikasi Moneter Krisis Keuangan Global.*, <http://www.mimodjo.blogspot.com>. (3 Oktober 2008)

<sup>8</sup> *Ibid.*

2007 sebesar 6,33 persen. Ini merupakan angka tertinggi setelah krisis. Namun, krisis global lanjutan kali ini perlu mendapatkan perhatian lebih serius dari pengambil kebijakan. Beberapa indikator domestik menunjukkan bahwa akan terdapat dampak lebih pada perekonomian nasional. Yang terlihat dari tekanan luar bisa kini tengah terjadi di pasar uang domestik, baik saham maupun obligasi. Sampai dengan akhir minggu lalu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terus terpuruk dan mendekati level 1600, yang berarti terkoreksi lebih sekitar 1.000 poin.

Adapun mata uang rupiah terus tertekan selama dua pekan terakhir, dan ditutup melemah 20 persen pada nilai Rp 9.450 per dollar Amerika Serikat.<sup>9</sup>

Kegiatan di dalam pasar modal ditunjukkan oleh indeks yang setiap hari mengukur aktivitas ekonomi suatu negara secara keseluruhan. Pasar modal telah menjadi ukuran berkembang dan menurunnya perekonomian suatu masyarakat.<sup>10</sup>

Demikian pula tekanan hebat terus terjadi pada pasar Surat Utang Negara, yang terlihat dari kenaikan yield yang mencapai di atas 50 basis poin untuk semua jenis obligasi. Pada saat yang sama, *yield curve* terus bergerak naik, yang menandakan adanya ekspektasi pengetatan moneter dalam jangka pendek menengah.

Faktor pergerakan asing menjadi faktor dominan yang menyebabkan keterpurukan pasar uang dan obligasi domestik. Para investor global mencari tempat yang aman dengan melakukan *capital flight* menuju aset-aset berisiko rendah dan berkualitas dan meninggalkan aset di *emerging market*, termasuk Indonesia. Dengan kata lain, terdapat aliran likuiditas keluar yang menyulitkan perekonomian nasional. Jika gejolak di bursa global dan domestik ini akan kemudian menghantam perekonomian riil dan menghantam orang-orang di jalan, ini adalah hal yang sangat mengkhawatirkan. Masyarakat dewasa ini sudah diliputi seribu satu masalah, mulai kenaikan harga, ketiadaan pekerjaan, hingga kemiskinan. Tambahan masalah tentu harus diminimalkan. Untuk itu,

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Hamud M. Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Tatanusa, 2006), hlm.1.

pergerakan suku bunga harus benar diperhatikan agar tetap kondusif. Sebab, suku bungalah yang merupakan kunci keterkaitan antara pasar uang dan sektor riil. Peningkatan suku bunga sangat tinggi akan berakibat dialihkannya dana pada simpanan. Pada gilirannya, itu akan menekan investasi dan mencekik dunia usaha. Suku bunga yang melangit juga akan memperparah kredit bermasalah (*Non Performing Loan/ NPL*) dan menyulitkan rumah tangga karena meningkatnya jumlah cicilan, baik itu perumahan atau kredit lainnya.

Sulit mengharapakan suku bunga untuk bertahan di bawah dua digit dalam jangka pendek dan menengah. Tekanan terhadap suku bunga saat ini bukan hanya bersumber dari faktor eksternal, tapi juga internal.<sup>11</sup> Dalam hal ini, terdapat masalah likuiditas pada perbankan domestik, yang bisa dikatakan terparah semenjak krisis moneter pada 1997-1998.

Sampai saat ini, tingkat Loan to Deposit Ratio (LDR) perbankan nasional hingga akhir Agustus lalu telah mencapai 70,9 persen dan diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini disebabkan adanya ekspansi pesat kredit yang mencapai 35 persen selama tahun berjalan. Sementara, di saat sama, volume Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dijaring perbankan hanya meningkat sebesar sebelas persen.

Peningkatan *Loan to Deposit Ratio* tanpa diiringi dana pihak ketiga yang sama besar ini menandakan ketatnya likuiditas dan tingginya kompetisi di pasar uang saat ini. Satu hal yang sesungguhnya sudah terlihat dari maraknya perlombaan bank menawarkan suku bunga tinggi kepada depositor akhir-akhir ini.

Keketatan likuiditas juga terjadi bersamaan dengan peningkatan profil resiko dari perbankan nasional, yang terlihat dari bergerak naiknya tingkat Non Performing Loan ke level 5 persen.<sup>12</sup> Dengan kondisi tersebut, berat bagi bank sentral untuk mempertahankan suku bunga yang akan meningkatkan resiko bank. Peningkatan suku bunga Bank Indonesia adalah cara yang cepat

---

<sup>11</sup> M. Ikhsan Modjo, *loc.cit*

<sup>12</sup> *Ibid.*

dan mudah untuk meningkatkan jumlah dana pihak ketiga dan meningkatkan kualitas kredit ke sektor riil agar tidak terjadi penyaluran yang keliru.

Untuk mengurangi tekanan terhadap likuiditas dan suku bunga yang bisa berimplikasi buruk pada sektor riil, selain berbagai terapi fiskal berupa percepatan penyaluran pembelanjaran anggaran dan pengurangan surat utang negara, alternatif penggalangan dana di luar perbankan perlu diintensifkan. Salah satu caranya, mendorong penerbitan obligasi korporat yang hingga dewasa ini masih memiliki volume rendah, sekitar Rp 80 triliun (delapan puluh triliun).<sup>13</sup> Cara lainnya, mendesain sebuah struktur insentif baru pada penyaluran kredit perbankan. Hal ini bertujuan agar penyaluran kredit lebih diutamakan untuk sektor-sektor pertambangan yang produktif, bukannya pada sektor-sektor konstruksi, jasa, atau listrik yang cenderung bersifat spekulatif dan justru rawan menciptakan keuntungan-keuntungan perekonomian yang ditopang struktur yang tidak kuat yaitu konsumsi dan investasi terutama konsumsi domestik.

Perkembangan suatu pasar modal dipengaruhi oleh partisipasi yang aktif baik dari perusahaan yang akan menjual sahamnya, maupun investor serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam kegiatan pasar modal. Ini berarti bahwa tanpa adanya partisipasi yang aktif dari perusahaan-perusahaan yang potensial untuk *go public*, tidak adanya investor yang bergairah untuk menanamkan dananya dalam surat berharga dan kurang aktifnya lembaga-lembaga penunjang pasar modal, maka suatu pasar modal tidak akan berkembang dengan baik. Tetapi dengan adanya partisipasi yang aktif dari masing-masing pihak yang terlibat dalam kegiatan pasar modal, tanpa disertai dengan kualitas yang memadai dan perilaku yang baik dan rasa tanggung jawab sosial yang besar, akan mengakibatkan perkembangan yang kurang baik bagi pasar modal.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Pandji Anoraga dan Piji Pakarti, *Pengantar Pasar Modal*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm.97.



Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pasar modal antara lain:

1. Kondisi politik dan ekonomi, faktor ini mempengaruhi penawaran dan permintaan akan sekuritas. Kondisi politik yang stabil akan ikut membantu pertumbuhan ekonomi.
2. Masalah hukum dan peraturan, bahwa pembeli sekuritas pada dasarnya mengandalkan pada informasi yang disediakan oleh perusahaan-perusahaan yang menerbitkan sekuritas.
3. Keberadaan lembaga yang mengatur dan mengawasi kegiatan pasar modal dan berbagai lembaga yang memungkinkan dilakukan transaksi secara efisien, bahwa transaksi harus dapat dilakukan dengan efisien dan diperlukan berbagai lembaga dan profesi yang menjamin persyaratan-persyaratan tersebut dapat dipenuhi.<sup>15</sup>

Penurunan kinerja pasar modal Indonesia dapat dilihat dari menurunnya beberapa indikator di Bursa Efek Jakarta seperti Indeks Harga Saham Gabungan, nilai transaksi tahunan dan nilai kapitalisasi pasar Bursa Efek Jakarta. Disamping kondisi makro yang merupakan penyebab menurunnya kinerja, kondisi tersebut mengakibatkan menurunnya kepercayaan pemodal terhadap pasar modal. Disamping menurunnya kepercayaan pemodal, krisis keuangan juga berdampak pada tertundanya pengembangan infrastruktur pasar modal. Bahwa adanya empat faktor mikro yang menjadi penyebab krisis yakni hutang luar negeri, runtuhnya sektor perbankan, krisis kepemimpinan dan krisis politik.<sup>16</sup>

Secara umum, bagi negara-negara yang sedang berkembang, terintegrasinya pasar modal akan memberikan manfaat-manfaat antara lain:

- a. Meningkatkan kapitalisasi pasar dan aktivitas perdagangan
- b. Meningkatkan partisipasi pemodal asing dalam pasar domestik

---

<sup>15</sup> Suad Husnan, *Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2001), hlm.8-9.

<sup>16</sup> Jusuf Anwar, *Pasar Modal sebagai Sarana Pembiayaan*, (Jakarta: Alumni, 2005), hlm.178-179.

c. Meningkatkan akses ke pasar internasional<sup>17</sup>

Oleh karena itu dibentuklah Badan Pengawas Pasar Modal atau biasa disebut dengan Bapepam. Bapepam adalah lembaga atau otoritas tertinggi di pasar modal yang melakukan pengawasan dan pembinaan atas pasar modal. Bapepam diharapkan dapat mewujudkan tujuan penciptaan kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, transparan, efisien serta penegakan peraturan (*law enforcement*) dan melindungi kepentingan investor di pasar modal. Bapepam secara struktural ada di bawah pengawasan dan pengendalian Menteri Keuangan. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 503/KMK.01/1997, Badan Pengawas Pasar Modal adalah pelaksana tugas di bidang pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan pasar modal yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan, dan dipimpin oleh seorang ketua.<sup>18</sup>

Selain Bapepam yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kegiatan pasar modal di Indonesia dan melindungi investor dari dampak krisis keuangan global ini. Bank Indonesia pun memiliki peranan penting dalam mengantisipasi dari dampak terjadinya krisis keuangan global. Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah dan untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut:

- (1) menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
- (2) mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
- (3) mengatur dan mengawasi Bank<sup>19</sup>

Bahwa pengawasan terhadap bank oleh Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dapat bersifat pengawasan langsung atau pengawasan tidak langsung. Menurut penjelasan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang No 23 Tahun 1999

---

<sup>17</sup> M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm.23.

<sup>18</sup> Tjiptono Darmadji dan Hendy M.Fakhrudin, *Pasar Modal di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), hlm.14.

<sup>19</sup> Y. Sri Susilo, Sigit Triandaru, A. Totok Budi Santoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2000), hlm.12.

tentang Bank Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan pengawasan langsung adalah dalam bentuk pemeriksaan yang disertai dengan tindakan-tindakan perbaikan. Sedangkan yang dimaksud dengan pengawasan tidak langsung terutama dalam bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis, evaluasi laporan bank. Berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan bank, pada dasarnya hal-hal yang dapat dilakukan oleh otoritas pengawasan meliputi 4 kewenangan yaitu kewenangan memberikan izin, kewenangan untuk mengatur, kewenangan untuk mengendalikan, kewenangan untuk mengenakan sanksi.<sup>20</sup>

Berkaitan dengan masalah-masalah tersebut, penulis tertarik membuat skripsi dengan judul: **"Pengawasan Bank Indonesia Terhadap Bank Swasta Nasional Dalam Kaitannya Dengan Krisis Keuangan Global (Studi Kasus Bank Century)**

## **B. Pokok Permasalahan**

Pokok permasalahan merupakan pengenalan terhadap berbagai faktor yang menjadi penyebab timbulnya suatu masalah. Dari penjelasan yang telah disampaikan oleh penulis diatas, maka penulis akan menyimpulkan beberapa masalah. Perumusan masalah memang merupakan salah satu bagian yang sangat penting di dalam penelitian hukum.

Dalam hal ini penulis akan mengkaji pokok permasalahan sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Apa pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia kepada bank swasta nasional (Bank Century Tbk) dalam menghadapi krisis keuangan global?
2. Kebijakan apa yang diambil oleh Bank Indonesia terhadap Bank Century?

## **C. Tujuan Penelitian**

---

<sup>20</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm.165.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm. 110

Penelitian bertujuan untuk memperoleh data mengenai hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain atau ingin menguji suatu hipotesa<sup>22</sup> suatu penelitian yang baik akan memberikan suatu yang bermanfaat bagi penulis dan masyarakat pada umumnya, oleh karena itu penelitian diharapkan:

1. Mengetahui mengenai pengawasan oleh Bank Indonesia terhadap bank-bank swasta nasional dalam menghadapi krisis keuangan global.
2. Mengetahui mengenai kebijakan-kebijakan seperti apa yang diambil oleh Bank Indonesia terhadap Bank Century.

#### **D. Metode Penelitian**

Metode merupakan suatu tipe pemikiran dalam penelitian dan penilaian, teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan dan cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur. Penelitian diartikan sebagai salah satu usaha untuk menemukan mengembangkan dan menguji kebenaran suatu permasalahan untuk memperoleh dan mengumpulkan data yang diperlukan untuk tercapainya sasaran yang diharapkan.<sup>23</sup>

Teknik pengumpulan data dalam penelitian dapat dilakukan dengan cara studi dokumen (*documentary research*) dan studi lapangan (*field research*). Adapun cara-cara untuk memperoleh data akan dijelaskan sebagai berikut:

##### **1. Bentuk Penelitian**

Bentuk penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah penelitian empiris. Yang mana penelitian ini adalah pengumpulan materi atau bahan penelitian yang harus diupayakan atau dicari sendiri oleh karena belum tersedia. Kegiatan yang dilakukan dapat berbentuk membuat pedoman wawancara dan diikuti dengan mencari serta mewawancarai para informan, menyusun kuisisioner dan kemudian mengedarkan kuisisioner itu pada responden, melakukan pengamatan (observasi).

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm.96.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm.5.

## **2. Data Penelitian**

### **a. Bahan hukum bersumber pada:**

#### (1) Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian dilapangan dengan cara mewawancarai narasumber yang berkompeten di bidangnya.

#### (2) Data Sekunder

Data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang terdiri dari :

- (a) Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat. Yang mencangkup ketentuan peraturan perundang-undangan seperti UU No. 3 Tahun 2004 jo. UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, UU No. 10 Tahun 1998 jo UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- (b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang isinya menjelaskan bahan hukum primer seperti buku, artikel, majalah, skripsi, Internet.
- (c) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder atau disebut juga bahan penunjang, seperti kamus.<sup>24</sup>

## **E. Definisi Operasional**

Di dalam penulisan skripsi ini ada beberapa istilah yang perlu diberikan penjelasan terlebih dahulu agar tidak terjadi perbedaan penafsiran.

Adapun istilah-istilah tersebut adalah :

1. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk

---

<sup>24</sup> Heru Susetyo, Henry Arianto, *Pedoman Praktis Menulis Skripsi*, (Jakarta: FH Universitas Indonusa Esa Unggul), hlm. 11.

kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>25</sup>

2. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan mengawasi perbankan.<sup>26</sup>
3. Pasar Modal adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang ataupun modal sendiri.<sup>27</sup>
4. Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka.<sup>28</sup>
5. Indeks harga saham adalah indikator utama yang menggambarkan pergerakan harga saham.<sup>29</sup>
6. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) adalah indeks gabungan dari seluruh jenis saham yang tercatat di bursa efek.<sup>30</sup>
7. *Nasabah Non Investment Grade* adalah nasabah yang tidak memiliki peringkat investasi yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat.<sup>31</sup>

---

<sup>25</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perbankan*, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 jo Undang-Undang No 7 Tahun 1992, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790, Pasal 1 Nomor 2.

<sup>26</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Bank Indonesia*, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 jo Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 1999, LN No 7 Tahun 2004, TLN No. 4357, Penjelasan Pasal 4 ayat 1.

<sup>27</sup> Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, *op. cit*, hlm. 1.

<sup>28</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pasar Modal*, Undang-Undang No 8 Tahun 1995, LN No. 64 Tahun 1995, TLN No. 3608, Pasal 1.

<sup>29</sup> Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, *op. cit*, hlm. 95.

<sup>30</sup> Mohamad Samsul, *Pasar Modal dan Manajemen Portofolio*, (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 185.

<sup>31</sup> Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang penilaian kualitas aktiva bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah*, Peraturan Bank Indonesia No 9/ 9/ PBI/ 2007 jo Peraturan Bank Indonesia No 8/ 21/ PBI/ 2006 Pasal 16 ayat 3 huruf a.

8. *Derivatif* adalah efek turunan dari efek utama, baik yang bersifat penyertaan maupun utang. Efek turunan dapat berarti turunan langsung dari efek utama maupun turunan selanjutnya atau turunan kedua.<sup>32</sup>
9. *Hedge Funds* adalah tindakan melindungi aset yang dimiliki dengan cara menutup kontrak jual ataupun kontrak beli di pasar berjangka untuk mengurangi kemungkinan kerugian yang akan di derita.<sup>33</sup>
10. *Private Equity* adalah serangkaian teknik yang digunakan untuk membiayai beberapa perusahaan yang tidak melibatkan aset yang terpublikasi seperti saham korporasi dan obligasi.<sup>34</sup>
11. *Hyper Inflasi* adalah kenaikan dalam harga barang dan jasa yang terjadi pada tingkatan yang sangat tinggi yaitu jutaan sampai triliunan persen per tahun karena permintaan bertambah lebih besar dibandingkan dengan penawaran barang di pasar.<sup>35</sup>
12. *Second Round Effect* adalah suatu keadaan dimana krisis tidak secara serius mempengaruhi perekonomian domestik. Hal ini mengingat dampak yang ada lebih bersifat tidak langsung akibat adanya keburukan ekspektasi perekonomian global.<sup>36</sup>
13. *Capital Outflow* adalah suatu keadaan dimana permintaan Dolar meningkat, mendorong penguatan Dolar terhadap mata uang lain.<sup>37</sup>

---

<sup>32</sup> Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, *op. cit*, hlm. 4.

<sup>33</sup> Mohamad Samsul, *op. cit*, hlm. 24.

<sup>34</sup> Permata Wulandari, "Private Equity: Jurus Efektif bagi Pembiayaan Perusahaan." <http://www.vibiznews.com> (11 April 2008)

<sup>35</sup> Nona Widiarti, "Inflasi, Sejarah, Definisi, Perspektif Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam," <http://www.hendrakholid.net> (18 November 2008)

<sup>36</sup> M. Ikhsan Modjo, "Mewaspadaai Krisis", <http://www.mimodjo.blogspot.com> (18 September 2008)

<sup>37</sup> Panji, "Bersiap Untuk yang Terburuk.", <http://www.starbuckerseconomists.blogspot.com> (27 Oktober 2008)

14. *Yield Curve* adalah suatu kurva yang menunjukkan keuntungan atas investasi obligasi yang dinyatakan dalam persentase. Keuntungan atas investasi dapat berupa kupon yang diterima maupun selisih kurs obligasi.<sup>38</sup>
15. *Capital Flight* adalah suatu keadaan dimana turunnya harga sejumlah efek sekuritas.<sup>39</sup>
16. *Go Public* adalah proses yang harus dijalani dari status Perseroan Tertutup menjadi perusahaan publik yang dimiliki oleh masyarakat luas, atau menjadi Perseroan Terbuka.<sup>40</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Agar mempermudah suatu penulisan dari hasil penelitian, maka penulis menjabarkan ke dalam beberapa Bab antara lain:

### **BAB I      Pendahuluan.**

Di dalam bab ini penulis menjelaskan beberapa hal seperti, Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

### **BAB II     Tinjauan umum tentang Perbankan**

Didalam bab ini penulis menjelaskan pengertian perbankan, sumber hukum perbankan, fungsi perbankan dan asas-asas hukum perbankan.

### **BAB III    Tinjauan tentang Bank Indonesia**

Didalam bab ini penulis akan menjelaskan pengertian Bank Indonesia, tugas dan kewenangan Bank Indonesia, peran Bank Indonesia, pengawasan Bank Indonesia.

---

<sup>38</sup> Mohamad Samsul, *op. cit*, hlm 229.

<sup>39</sup> Panji, "Reksadana Today: Maju Kena Mundur Kena.", <http://www.warung-reksadana.blogspot.com> (1 Nov 2008)

<sup>40</sup> Mohamad Samsul, *op.cit*, hlm. 389.



**BAB IV    Analisa pengawasan Bank Indonesia terhadap penyelesaian kasus Bank Century Tbk dalam krisis keuangan global**

Dalam bab ini, penulis akan menganalisa tentang terbentuknya Bank Century Tbk, pelanggaran Bank Century Tbk, pengawasan seperti apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap bank swasta nasional dalam menghadapi krisis keuangan global ini dan kebijakan terhadap dampak krisis keuangan global.

**BAB V    Penutup**

Dalam Bab ini, penulis akan menulis mengenai kesimpulan dan saran, berdasarkan hasil penelitian yang mengacu pada kondisi ideal yang seharusnya.